

Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia

Dewi Sartika¹⁾, Elisa Nurhalisyah²⁾, Mughiroh Islam³⁾, Muhammad Iqbal Deswara⁴⁾, Nazwa Putri Arti Kusnaedi^{5*)}, Rizki Utama Putra⁶⁾, Ibnu Malik⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Corresponding author. nazwaputriarti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Development Administration, Good Governance, Bureaucratic Reform.

How to cite:

La Wati, Joko Tri Brata, La Ode Hasisin, La Ali (2025). *Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas: Meningkatkan Kesadaran dan Kualitas Lingkungan*.



ABSTRACT

This article discusses the strategic role of bureaucratic reform and the principles of good governance in improving the effectiveness of development administration in Indonesia. Development administration is understood as a process of managing resources systematically, integrated, and sustainably to achieve the goals of equitable and prosperous national development. This study uses a literature review method with descriptive analysis of related literature, regulations, and research results. The results of the study indicate that the effectiveness of development administration is greatly influenced by the quality of planning, policy implementation, and optimal monitoring and evaluation mechanisms. The main challenges identified include corruption, socio-economic inequality, weak accountability, and disparities in capacity between regions. Efforts to reform bureaucracy, strengthen institutions, implement e-government, and increase community participation are key strategies in realizing more transparent, accountable, and inclusive development governance. Thus, optimizing development administration based on the principles of good governance is believed to be able to accelerate the achievement of national development goals and improve the welfare of the Indonesian people.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang kompleks, multidimensional, dan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, serta lingkungan. Dalam kerangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya sistem administrasi pembangunan yang efektif, efisien, dan adaptif. Administrasi pembangunan tidak hanya berperan sebagai alat pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh sprogram pembangunan (Siagian, 2005, Peratama, 2019).

Secara teoritis, administrasi pembangunan menurut (Gant, 1979) didefinisikan sebagai serangkaian proses pengelolaan sumber daya ekonomi, manusia, serta institusional, yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara sistematis dan terukur. Senada dengan itu, Bintoro Tjokroaminoto dalam Fauzi & Mahendrati (2021) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan memuat tiga dimensi utama yaitu pengembangan administrasi (administrative reform), administrasi untuk pembangunan (administration of development), dan pencapaian tujuan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Administrasi pembangunan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN yang menegaskan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin. Dalam kerangka ini, pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek (Setiawan, F., & Pembangunan, 2019). Peran birokrasi yang efektif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang modern (Amal, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya administrasi pembangunan dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan, kualitas implementasi kebijakan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang optimal (Parinem & Karningsih, 2023). Sementara itu, Agus Suryono (2020) dalam kajian mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi mengemukakan bahwa target reformasi birokrasi sulit dicapai karena struktur organisasi yang gemuk dan SOP rumit—hal ini secara implisit menunjukkan pentingnya prinsip good governance seperti efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Di sisi lain, Penelitian menunjukkan bahwa korupsi dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi hambatan utama efektivitas pembangunan, dimana ketimpangan, tata kelola pemerintahan, dan korupsi secara signifikan memengaruhi kemiskinan dan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional (Hilmi et al., 2018). Selain itu, ketimpangan yang makin melebar di masa pandemi mencerminkan lemahnya tata kelola dan transparansi, serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Majazeta Yusrina et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital melalui e-government, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui penelitian ini, akan dikaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia dijalankan, capaian yang telah diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan administrasi pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan inklusif.

2. Tinjauan Pustaka

Administrasi pembangunan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Secara umum, administrasi pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Gant (1979), administrasi pembangunan adalah proses yang mengarahkan organisasi menuju pencapaian sasaran pembangunan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, (Peratama, 2019) menegaskan bahwa administrasi pembangunan mencakup seluruh upaya pengelolaan sumber daya nasional secara optimal demi mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan secara sistematis.

Penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dalam pelayanan publik berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (Mulanda & Adnan, 2023), sementara di era digital, penerapan e-government bersama prinsip good governance terbukti mendorong efektivitas pelayanan secara signifikan (Putu & Prabawati, 2024). Dengan demikian, administrasi pembangunan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama, dimana seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menciptakan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan administrasi pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang kuat agar dapat berjalan secara efektif. Sawir & Aljurida (2025) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi menjadi elemen krusial dalam administrasi pembangunan daerah. Studi di berbagai lembaga pemerintahan daerah membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi memainkan peran utama dalam keberhasilan perencanaan dan pengelolaan anggaran, meski implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Partisipasi masyarakat, misalnya, menjadi kunci keberhasilan pembangunan karena memungkinkan adanya kontrol sosial sekaligus memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, kualitas sumber daya manusia birokrasi, ketersediaan anggaran pembangunan, partisipasi masyarakat yang aktif, serta kondisi politik dan keamanan yang stabil (Hilmi et al., 2018). Pemerintah yang mampu merumuskan kebijakan yang adaptif serta didukung oleh aparatur birokrasi yang profesional akan lebih mudah mewujudkan tujuan pembangunan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan administrasi pembangunan, berbagai strategi pun dikembangkan. Reformasi birokrasi, desentralisasi, penerapan prinsip good governance, serta pemanfaatan teknologi digital terbukti meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik dalam administrasi pembangunan. Strategi ini mendorong terciptanya tata kelola yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel (Pradana, 2021). Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Meski demikian, dalam implementasinya, administrasi pembangunan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Korupsi, birokrasi yang kaku, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, ketimpangan sosial, serta dinamika global yang terus berkembang merupakan beberapa kendala utama yang kerap menghambat efektivitas administrasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kapasitas institusi publik agar mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu turut memberikan gambaran mengenai pentingnya administrasi pembangunan dalam konteks modern. Septiana Dwiputrianti (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa implementasi administrasi pembangunan yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara berkesinambungan. Sementara itu, Suryono (2020) menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang didukung oleh sistem pengawasan yang ketat guna mewujudkan *good governance* sebagai pondasi utama pembangunan nasional.

Dengan demikian, administrasi pembangunan memegang peran sentral dalam proses pembangunan bangsa. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, serta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Apabila prinsip-prinsip administrasi pembangunan dapat dijalankan dengan

baik, maka cita-cita pembangunan nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu berisi teori-teori yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan dengan model analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan jurnal-jurnal.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Yusuf & Khasanah, 2019). Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

4. Hasil dan Pembahasan

Administrasi pembangunan merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional di Indonesia. Administrasi ini tidak hanya sebatas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan pembangunan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa arah pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pembangunan harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penguatan kesatuan nasional (Setiawan, F., & Pembangunan, 2019). Administrasi pembangunan memiliki karakteristik utama seperti perumusan kebijakan berbasis kebutuhan publik, koordinasi antarinstansi, efisiensi anggaran, serta pengawasan partisipatif. Pemerintah merancang dokumen seperti RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L, yang menjadi dasar integrasi kebijakan dengan APBN dan APBD. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi program, hingga evaluasi hasil, yang diharapkan berlangsung secara partisipatif dan berbasis data.

Menurut Tjokroaminoto (Fauzi & Mahendradi, 2021), administrasi pembangunan mencakup tiga dimensi utama. Pertama, reformasi administrasi sebagai upaya pembaruan birokrasi agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Kedua, administrasi untuk pembangunan, yakni bagaimana pemerintah berperan sebagai fasilitator pembangunan. Ketiga, pembangunan untuk administrasi, yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah agar mampu menjalankan pembangunan secara efisien. Ketiga dimensi ini menjadi kerangka konseptual dalam memahami fungsi administrasi pembangunan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Dalam tataran praktis, ketiga dimensi ini menjadi pijakan dalam merancang strategi pembangunan nasional dan daerah yang berbasis pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta daya dukung kelembagaan yang kuat.

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan lokal. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) merupakan instrumen utama transfer fiskal dari pusat ke daerah. Kementerian Keuangan tahun 2023 mencatat bahwa 33,9% dari total belanja negara dialokasikan ke daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas lokal (Purwowidhu, 2024). Namun, terdapat ketimpangan dalam kemampuan tata kelola antar daerah. Daerah-daerah maju seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki kapasitas SDM, teknologi, dan fiskal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah tertinggal seperti Papua atau NTT. Beberapa studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal masih dibatasi oleh

ketimpangan kapasitas sumber daya dan lemahnya pengawasan internal terhadap penggunaan dana transfer daerah. Contohnya, Dalam Laporan Pemeriksaan Keuangan BPK Semester I 2023, ditemukan lebih dari 1.700 temuan penyimpangan di daerah, yang mencakup kelemahan dalam pelaporan, pelaksanaan proyek, dan penggunaan anggaran—menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 1,9 triliun. Data ini menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas publik di tingkat daerah (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2023).

Dari indikator makro, administrasi pembangunan Indonesia telah mencatatkan kemajuan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 5,05% menurut BPS, didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur strategis (Sipayung, 2024). Pemerintah juga berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 5,32% dan tingkat kemiskinan nasional menjadi 9,03%. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurut Bappenas RI (2023), konsumsi rumah tangga yang tinggi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga selama fase pemulihan pasca-pandemi. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait kualitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, dan kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) pada 2023 tercatat masih stagnan di angka 0,384. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia memang mengalami peningkatan menjadi 74,39 pada 2023, tetapi disparitas antarprovinsi masih tinggi—misalnya, DKI Jakarta mencapai 81,65 sementara Papua Pegunungan hanya 59,09 menurut BPS (Sipayung, 2024).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam mendorong kinerja instansi. Kementerian PANRB (2024) melaporkan bahwa 71,7% instansi pusat dan daerah meraih predikat “B” hingga “A”. Ini mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan anggaran berbasis output dan outcome, bukan sekadar serapan. Contoh konkret dari penerapan SAKIP dapat dilihat di Provinsi Jawa Tengah, yang berhasil menyinergikan e-Planning dengan e-Budgeting. Gubernur saat itu, Ganjar Pranowo, mendorong penggunaan dashboard kinerja sebagai alat pemantau real-time terhadap capaian indikator pembangunan (PANRB, 2024). Namun demikian, capaian kinerja masih belum sepenuhnya linier dengan tingkat kepuasan publik. Hasil dari Litbang, menurut (Kompas.com, 2023) yang mencatat tingkat kepuasan publik pada sektor kesejahteraan (termasuk pendidikan dan kesehatan) mencapai 78 %, yang menandakan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai outcome pembangunan. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem reward and punishment yang lebih kuat berbasis SAKIP serta memperluas pelatihan berbasis kompetensi kepada aparatur sipil negara di sektor pelayanan dasar.

Transformasi digital merupakan faktor akseleratif dalam administrasi pembangunan. Berdasarkan laporan Kominfo, sekitar 89% pemerintah daerah telah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini mendorong efisiensi administrasi, transparansi layanan publik, serta penguatan integritas birokrasi. Inovasi seperti aplikasi LAPOR!, e-Monev, SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), serta integrasi data melalui Satu Data Indonesia menjadi pilar dalam penyederhanaan birokrasi. Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan AI dan big data dalam penyusunan kebijakan berbasis evidence. Namun, tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Menurut data dari (BSKDN.Kemendagri, 2024) mencatat bahwa masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum optimal dalam implementasi SPBE karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan konektivitas internet; hal inilah yang mendasari pengembangan aplikasi *Puja Indah* sebagai solusi adopsi SPBE di daerah 3T dan berketerbatasan. Tantangan literasi digital juga menjadi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat secara daring. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif seperti Dana Desa Digital dan program pelatihan literasi digital berbasis komunitas menjadi penting untuk mengakselerasi transformasi digital secara inklusif di seluruh Indonesia.

Korupsi merupakan masalah krusial dalam pelaksanaan administrasi pembangunan. Transparency International menurut Albu & Murphy (2024) menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menempatkan negara ini di peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei.. Sepanjang 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 124 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,4 triliun. Beberapa kasus besar melibatkan pejabat daerah, seperti kasus korupsi Bansos COVID-19 dan manipulasi pengadaan barang dan jasa. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan audit eksternal masih perlu diperkuat. Menurut Hanafi & Harsono (2020), pembentukan Zona Integritas di Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam reformasi birokrasi; tanpa adanya komitmen moral dari pemangku kepentingan, upaya reformasi tidak akan berhasil. KPK juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum ASN dan pelatihan kepemimpinan. Program "JAGA" yang digagas KPK menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan melaporkan penyimpangan dalam pelayanan publik. Selain itu, pembentukan whistleblower system yang efektif dan perlindungan terhadap pelapor sangat dibutuhkan guna menciptakan iklim yang kondusif untuk pemberantasan korupsi di birokrasi.

Good governance menjadi prinsip utama dalam reformasi administrasi pembangunan. UNDP menetapkan bahwa prinsip-prinsip ini mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Indonesia telah menerjemahkannya dalam kebijakan seperti e-budgeting, Musrenbang, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga meningkat. Menurut BPS , keikutsertaan warga dalam Musrenbang naik dari 45,6% pada 2020 menjadi 53,2% pada 2023 (Sipayung, 2024). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan perguruan tinggi dan LSM juga menguat. Lembaga seperti ICW, PATTIRO, dan Pusat Studi Kebijakan UI terlibat aktif dalam mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah-sipil dalam pembuatan kebijakan berbasis riset. Sinergi antara lembaga negara, lembaga akademik, dan civil society menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang demokratis dan inklusif.

Dari sejarah administrasi pembangunan Indonesia, pembelajaran dari era Orde Lama dan Orde Baru memberikan pemahaman penting. Di masa Orde Lama, pembangunan lima tahunan (REPELITA) memberikan arah pembangunan terencana meskipun dalam sistem politik yang tidak stabil. Sedangkan masa Orde Baru mengedepankan pendekatan teknokratis dan stabilitas politik, walau juga dibayang-bayangi oleh sentralisasi kekuasaan dan praktik KKN (Ilmar, 2017; Pratiwi, 2016) . Secara teoritis, (Siagian, 2005; Terry, 1972) menegaskan bahwa fungsi manajerial (planning, organizing, actuating, controlling) harus diterapkan secara seimbang. Dwiyanto (2021)menekankan pentingnya integrasi prinsip good governance ke dalam proses administrasi pembangunan. Sedangkan beberapa studi menegaskan bahwa birokrasi modern harus bersifat adaptif, profesional, dan inovatif untuk menjawab tuntutan digitalisasi dan globalisasi, dengan struktur yang agile dan pemanfaatan teknologi sebagai dasar layanan public (kementerian Sekretariat Negara RI, 2020; Times indonesia, 2021).

Pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi positif, terutama dalam aspek perencanaan terintegrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan akuntabilitas. Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti ketimpangan wilayah, korupsi, serta ketidaksesuaian antara capaian anggaran dengan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan administrasi pembangunan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga pemerintah pusat dan daerah, peningkatan partisipasi publik secara bermakna, penguatan pengawasan internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi secara merata, dan pembangunan kapasitas SDM birokrasi yang profesional dan berintegritas. Administrasi

pembangunan akan berfungsi optimal sebagai pilar pembangunan nasional apabila seluruh pihak mampu bersinergi dengan semangat transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan.

5. Kesimpulan

Administrasi pembangunan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek seperti perencanaan terintegrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas birokrasi. Penerapan prinsip good governance juga mulai diterapkan secara lebih luas, dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Namun demikian, efektivitas administrasi pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Ketimpangan kapasitas antarwilayah, keterbatasan infrastruktur digital, dan masih lemahnya pengawasan internal menjadi hambatan yang belum terselesaikan secara tuntas. Di samping itu, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil menciptakan sistem yang bersih dan berintegritas.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan, khususnya pada pendekatan analitis yang lebih banyak mengandalkan data sekunder dan studi literatur, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika dan kompleksitas di tingkat pelaksana lapangan. Oleh karena itu, untuk memperkaya pemahaman mengenai efektivitas administrasi pembangunan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kualitatif melalui observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, atau studi kasus spesifik di daerah-daerah dengan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pembangunan yang kontras. Selain itu, penelitian ke depan juga dapat menggali lebih dalam hubungan antara kualitas kelembagaan publik dan persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah, guna merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Albu, O. B., & Murphy, J. (2024). Measuring corruption perceptions in Tunisia: transparency international, the corruption perception index and the world bank. In *The Elgar Companion to the World Bank* (pp. 263–273). Edward Elgar Publishing.
- Amal, I. (2024). *Peran Birokrasi dalam Reformasi Pemerintahan Indonesia*. 9(2), 11–16.
- Bappenas RI. (2023). *Indonesia Dan Dunia*. 7(4), 2 dan 15.
- Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. (2023). *BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai RP18,19 Triliun pada Semester I Tahun 2023*. Bpk.Go.Id.
- BSKDN.Kemendagri. (2024). *Percepat Layanan Publik Berbasis Elektronik, BSKDN Kemendagri Teken Komitmen Pemanfaatan Puja Indah dengan Daerah*. Bskdn.Kemendagri.Go.Id.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Fauzi, R., & Mahendrati, R. M. (2021). Pemberdayaan Pertanian Masyarakat Melalui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Demi Tercapainya Ketahanan Pangan. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 5(1), 2614–4220.
- Gant, G. F. (1979). *Development Administration: Concepts, Goals, Methods*. University of Wisconsin Press.
- Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian [Implementation of Bureaucratic Reform with the Construction of an Integrity Zone at the Ministry of Industry]. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran JIKAP*, 4(1).
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 3(2),

91–102.

- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i1.796>
- kementrian Sekertariat Negara RI. (2020). *Penyederhanaan Birokrasi untuk Wujudkan Governansi Publik yang Lebih Inovatif, Adaptif dan Responsif*. Setneg.Go.Id.
- kompas.com. (2023). *Survei Litbang “Kompas”: 78 Persen Responden Puas dengan Kinerja di Sektor Kesejahteraan*. Nasional.Kompas.Com.
- Majazeta Yusrina, K., Maharani, M., Ula Aliffah, N., & Ratmaningsih, N. (2024). Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(12), 1328–1337. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158>
- manpan.go.id. (2024). *Kementerian PANRB Umumkan Hasil Evaluasi RB, 382 Instansi Pemerintah Berpredikat Minimal Baik*. Manpan.Go.Id.
- Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). IMPLEMENTASI TEORI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal FISIPublik 2019/2020*, 8, 2.
- Parinem, & Karningsih. (2023). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), 115–119. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.491>
- Peratama, P. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten* 1176–1190.
- Pradana, A. W. (2021). Decentralization Practice in Developing Countries: Lessons for Indonesia. *Journal of Governance*, 6(2), 319–339. <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12662>
- Pratiwi, M. Y. (2016). PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE BARU (REZIM SOEHARTO) TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA. *Historia Vitae*, 15(2), 1–23. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.218-235>
- Purwowidhu, C. (2024). *Ekonomi Indonesia 2023: Racikan Tepat Kebijakan*. Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id.
- Putu, N., & Prabawati, A. (2024). *Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance di Era Digital*. 1(5), 1–8.
- Sawir, M., & Aljurida, A. M. A. (2025). *Evaluasi Penerapan Governance dalam Anggaran Daerah Prinsip Good Pengelolaan*. 1(1), 1–16.
- Septiana Dwiputrianti, Ph.D. Dr. Rulinawaty, S.Sos, M. S., & Dr. Hendrikus Triwibawanto Gedeona, M. S. P. (2025). *Evaluasi kebijakan teori dan praktek administrasi pembangunan, ekonomi dan sdm di era ai* (Issue April).
- Setiawan, F., & Pembangunan, A. (2019). *PENGARUH TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KE -3 DALAM*. 2(8), 59–69.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajerial*.
- Sipayung, R. S. G. S. (2024). *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*. Setkab.Go.Id.
- Suryono, A. (2020). Kebijakan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dalam penataan organisasi dan tata laksana. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i1.4027>
- Terry, G. R. (1972). *Principles of management*. (No Title).

Dewi Sartika, Elisa Nurhalisyah, Mughiroh Islam, Muhammad Iqbal Deswara, Nazwa Putri Arti Kusnaedi, Rizki Utama Putra, Ibnu Malik

times indonesia. (2021). *Birokrasi Adaptif di Era Digital*. Timesindonesia.Co.Id.

Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.